

ANALISIS PERMASALAHAN BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF ISLAM

Zulhelmy

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau
e-mail: zulhelmy@eco.uir.ac.id

ABSTRACT

The increase in the price of fuel oil or fuel occurred many times due to many factors. For this reason, this study aims to analyze the increase in the selling price of fuel oil from an Islamic perspective. The method used is case studies and literature or literature review with the latest data on price increases in August 2022. The results of the analysis are that according to the government the factor in the increase in the selling price of fuel oil in Indonesia is the revocation of subsidies, there are 5 reasons: (1) State Budget "Earned" by subsidies; (2) subsidies reduce people's independence; (3) subsidies reduce smuggling; (4) subsidies are only enjoyed by the upper class; and (5) subsidies to reduce poverty. However, the reality is that fuel subsidies have never been given to the people, instead it is the people who subsidize the government. So the term subsidy was replaced by the difference between the international oil price and the price imposed by the government on its own people. To overcome the problem of rising fuel prices, there are two solutions that can be proposed, namely tactical solutions and strategic solutions based on Islamic law.

Keywords: BBM, Subsidy, Tactic, Strategic

ABSTRAK

Kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM terjadi berkali-kali akibat banyak faktor. Untuk itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kenaikan harga jual bahan bakar minyak dari perspektif Islam. Metode yang digunakan adalah studi kasus dan literatur atau tinjauan pustaka dengan data yang terbaru kenaikan harga di bulan Agustus 2022. Hasil analisisnya adalah bahwa menurut pemerintah faktornya adanya kenaikan harga jual bahan bakar minyak BBM di Indonesia adalah adanya pencabutan subsidi, ada 5 alasan: (1) APBN "Digerogoti" subsidi; (2) subsidi mengurangi kemandirian rakyat; (3) subsidi mengurangi penyelundupan; (4) subsidi hanya dinikmati kalangan atas; dan (5) subsidi untuk mengurangi kemiskinan. Namun demikian, kenyataannya subsidi BBM tidak pernah diberikan kepada rakyat, justru rakyatlah yang mensubsidi pemerintah. Sehingga istilah subsidi diganti dengan selisih harga minyak internasional dengan harga yang dipaksakan oleh pemerintah kepada bangsanya sendiri. Untuk mengatasi permasalahan kenaikan BBM, ada dua solusi yang dapat diajukan, yaitu solusi taktis dan solusi strategis yang berdasarkan syari'at Islam.

Kata kunci: BBM, Subsidi, Islam, Taktis, Strategis

PENDAHULUAN

Pemerintah resmi mengumumkan kenaikan harga produk Bahan Bakar Minyak (BBM) penugasan, subsidi, hingga non subsidi. Penyesuaian harga BBM tersebut berlaku sejak Sabtu (3/9/2022) pukul 14.30 WIB. Pengumuman kenaikan harga BBM disampaikan pada Sabtu pukul 13.30 WIB

dan langsung berlaku satu jam setelah pengumuman disampaikan. Sebelum kenaikan resmi harga BBM, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia sempat mengungkapkan bahwa APBN 2022 tidak kuat lagi untuk menahan kenaikan harga BBM (<https://www.cnbcindonesia.com>).

Merujuk dari pernyataan Patra Niaga Irto Ginting, Corporate Secretary Pertamina, kenaikan harga BBM di Indonesia disebabkan karena harga rata-rata minyak mentah Indonesia atau yang dikenal dengan istilah ICP (Indonesia Crude Price) masih tergolong tinggi. Ia juga mengakui harga minyak mentah ini kerap bersifat fluktuatif. Namun, di Indonesia sendiri harganya masih cenderung tinggi. Berdasarkan catatan dari pihak Pertamina, harga rata-rata ICP per Juli 2022 ada di kisaran angka \$106,73 per barel, atau lebih tinggi sebesar 24% jika dibandingkan dengan bulan Januari 2022.

Penyebab kedua kenapa harga BBM naik 2022 adalah kondisi negara penghasil minyak. Mengutip dari Antara, pasukan minyak dunia lebih dari 50% berasal dari Timur tengah dan berpusat di 5 negara, yakni Arab Saudi, Iraq, Kuwait, Uni Emirat Arab, dan Qatar.

Sebagaimana diketahui, kelima negara tersebut juga cenderung mempunyai tensi geopolitik yang cukup tinggi. Hal ini tak urung membuat pasar khawatir jika suplai minyak akan berkurang dan berdampak pada harga minyak secara global yang akan cenderung meningkat.

Penyebab naiknya harga BBM ini tidak hanya berasal dari faktor eksternal saja, melainkan juga dipengaruhi oleh faktor internal. Hasil kalkulasi yang dilakukan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebutkan, bahwa anggaran subsidi Rp502 triliun berpotensi membengkak hingga hampir Rp700 triliun pada tahun 2022.

Itu sebabnya, Pemerintah berencana untuk menaikkan harga BBM bersubsidi untuk jenis Pertalite dan Solar. Di satu pihak, Aliansi Petani Indonesia mewanti-wanti pemerintah bahwa dampak kenaikan BBM akan mengganggu pasokan beras.

Namun di sisi lain, menurut hasil analisis dari Albertus Prabu Siagian selaku Climate Policy Initiative. Adanya pengurangan kebijakan tersebut akan

mendorong masyarakat untuk melakukan penghematan energi.

Harga minyak dunia yang melejit, yaitu berada di batas US\$104,9 per barrel membuat harga BBM pun kian meroket. Disamping itu, adanya nilai tukar rupiah yang bergerak di kisaran Rp14.750,00 membuat gap harga BBM bersubsidi antara harga ekonomis dengan harga jual eceran semakin melebar. Itulah beberapa faktor yang menyebabkan kenapa harga BBM naik 2022 di Indonesia.

Meningkatnya harga BBM dari tahun ke tahun tidak terlepas dari banyak faktor. Akan tetapi faktor yang tidak pernah berubah dari kenaikan BBM ini dari rezim ke rezim adalah faktor intervensi asing (Revrison, 2005). Pernyataan ini ada benarnya, karena ketika Gusdur menjadi presiden, ia pernah mengungkapkan bahwa sebenarnya kenaikan harga BBM bukan kemauan saya, akan tetapi ini adalah kemauan dari IMF. Dan secara implisit presiden SBY juga berdalih bahwa kenaikan BBM ini merupakan pilihan yang pahit, yang terpaksa dilakukan, bisa berarti ini dapat dikatakan “ini bukan kemauan saya akan tetapi ini kemauan World Bank”.

Peningkatan Harga BBM dari tahun ke tahun dan dari rezim ke rezim tidak terlepas dari variabel intervensi asing. Indikasinya dapat dilihat dari pernyataan secara eksplisit oleh Gusdur ketika menjadi presiden dan secara implisit oleh presiden SBY. Harga BBM menjadi naik, karena adanya pencabutan subsidi oleh pemerintah. Masa Presiden Jokowi pun alasannya juga sama yaitu bahwa APBN tidak sanggup menanggung beban subsidi BBM sebagaimana yang telah diungkapkan pada point 3 alasan kenaikan BBM oleh Rezim Jokowi senilai 502 Triliun, meskipun demikian data tersebut banyak dibantah para tokoh dan pengamat.

Kalau dilihat dari rezim ke rezim setidaknya ada lima alasan pemerintah untuk mencabut subsidi, yaitu; (1) APBN

“Digerogoti” subsidi; (2) subsidi mengurangi kemandirian rakyat; (3) subsidi mengurangi penyelundupan; (4) subsidi hanya dinikmati kalangan atas; dan (5) subsidi untuk mengurangi kemiskinan. Namun demikian, kenyataannya subsidi BBM tidak pernah diberikan kepada rakyat, justru rakyatlah yang mensubsidi pemerintah. Sehingga istilah subsidi diganti dengan selisih harga minyak internasional dengan harga yang dipaksakan oleh pemerintah kepada bangsanya sendiri. Untuk mengatasi permasalahan kenaikan BBM, ada dua solusi yang dapat diajukan, yaitu solusi taktis dan solusi strategis yang berdasarkan syari’at Islam.

Namun demikian, opini umum yang menyebar di berbagai media massa dan elektronik, alasan kenaikan harga BBM adalah untuk menyelamatkan keuangan Negara, yaitu APBN. APBN mengalami defisit (kekurangan/ketekoran) karena harga minyak mentah di pasar internasional mengalami kenaikan yang signifikan yaitu sebesar US\$104,9 per barrel. Sehingga untuk menutupi defisit APBN tersebut, perlu dilakukan pencabutan subsidi BBM. Alasan lainnya adalah subsidi selama ini hanya dinikmati oleh mereka yang sudah kaya, yakni yang punya kendaraan, atau bisa dialihkan lebih banyak untuk subsidi pendidikan, subsidi kesehatan, dan subsidi sembako. Menjadi pertanyaan bagi kita adalah mengapa subsidi BBM saja yang dicabut, mengapa subsidi lainnya seperti subsidi bunga obligasi bank rekap yang selama ini dinikmati bankir dan pengusaha nakal tidak dicabut? Bahkan ternyata nilai subsidi bank rekap adalah dua kali lipat jumlah subsidi BBM. Mengapa pemerintah tidak berupaya mencari sumber-sumber pemasukan keuangan lainnya?

METODE PENELITIAN

Tulisan ini berupaya mengungkapkan fakta dan hukum syara’ mengenai kenaikan

harga BBM dan bagaimana Islam menyelesaikan permasalahan umat khususnya permasalahan BBM dan sumber daya alam lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejak awal pemerintahan baik dari berbagai rezim sebelumnya maupun saat ini sebetulnya sudah dibangun opini yang intinya menekankan bahwa subsidi BBM adalah sesuatu yang negatif. Namun, kita melihat bahwa opini-opini tersebut pada kenyataannya bertentangan dengan fakta. Penjelasan adalah sebagai berikut:

1. APBN “Digerogoti” Subsidi.

Pada masa SBY, kalaulah memang APBN digerogeti oleh subsidi, mengapa Menteri Pendidikan Nasional mengeluhkan bahwa porsi pendidikan dalam APBN 2005 hanya 25,7 triliun atau hanya sekitar 10% dari total APBN (Rp264 triliun). Ini artinya anggaran tersebut belum memenuhi perintah UUD yang mewajibkan anggaran pendidikan minimal 20% dari APBN. Anehnya yang menjadi kambing hitam justru subsidi BBM.

Jika dilihat dari pos APBN 2005, program termahal adalah “Pembayaran Bunga Utang”, yaitu hampir Rp64 triliun (24%). Ini fakta yang jarang terungkap. Pada tahun 2003 saja, menurut Statistik Ekonomi Keuangan Indonesia, Nop-Des 2003 total bunga pinjaman mencapai \$10 miliar. Diprediksi untuk tahun 2005 jumlah bunga pinjaman mencapai \$12,2 miliar. Sehingga permasalahan utamanya adalah utang (utang bunga dan utang pokok) baik utang dalam negeri maupun utang luar negeri, bukan permasalahan subsidi. Munculnya utang ini memuncak ketika terjadinya krisis moneter.

Pada Masa Jokowi, katanya subsidi membebani APBN 2022 yakni 502 triliun, padahal menurut pakar ekonomi Anthony Budiawan yang sebenarnya hanya Rp11 Triliun dari total 134 triliun, sedangkan

sisanya adalah untuk elpiji Rp66triliun dan listrik Rp55 triliun. Sama halnya pada masa SBY, pada masa Jokowi pun porsi atau pos terbesar justru pembayaran bunga utang dengan rincian pembayaran bunga utang dalam negeri sebesar Rp393,7 triliun dan luar negeri Rp12,2 triliun. Namun yang dijadikan permasalahan utama adalah subsidi BBM.

2. Subsidi “Mengurangi Kemandirian” Rakyat.

Alasan ini sepintas masuk akal, akan tetapi menjadi bertolak belakang ketika pengelolaan BBM diserahkan kepada perusahaan Asing dengan berbagai dalih. Seperti belum adanya sumber daya manusia yang menguasai teknologi tinggi seperti pengolahan BBM, membutuhkan biaya yang mahal. Padahal BBM ini sesungguhnya merupakan milik rakyat, bukan Negara. Negara hanya berhak untuk mengelolanya, yang kemudian diberikan kepada rakyat. Sehingga tidak ada alasan subsidi malah mengurangi kemandirian rakyat. Artinya, rakyatlah yang menentukan sebenarnya harga dari BBM.

Kenyataan bahwa lading-ladang minyak telah dikuasi investor asing dan untuk itu harga minyak harus mengikuti pasar dunia—karena kalau harga BBM rendah investor asing ogah—seharusnya memacu pemerintah untuk mengusahakan sendiri sumber energi ini secara efisien. Kita tidak perlu tergesa-gesa menggali cadangan minyak kita sampai perlu memanggil investor asing.

3. Subsidi “Hanya Dinikmati Kalangan Atas”

Fakta yang terjadi justru penggunaan bensin premium tidak hanya kalangan atas. Angkutan perkotaan dipakai oleh rakyat berangkat sekolah atau bekerja setiap hari. Angkutan pedesaan membawa hasil bumi ke kota setiap hari. Selain bus dan truk, kendaraan ini semua membutuhkan bensin, bukan solar. Minyak tanah juga, sekalipun

masih bersubsidi, jika ongkos angkutnya naik, pasti akhirnya ikut naik. Sementara itu, bagi orang kaya atau pengusaha, banyak cara untuk memindahkan efek kenaikan BBM melalui mekanisme produksi sehingga tidak akan menurunkan standar hidupnya. Walhasil, tetap saja, akibat kenaikan BBM, yang kena getahnya (multiplier effect) rakyat kecil juga.

4. Pencabutan Subsidi BBM “Mengurangi Penyelundupan”.

Ada anggapan bahwa karena ada perbedaan harga BBM yang cukup besar antara di dalam dan di luar negeri, maka bagi pedagang, itu menjadi kesempatan emas. Meskipun tertangkap toh, mereka masih mendapatkan untung dari selisih harga penjualan BBM di dalam negeri dengan harga penjualan BBM di luar negeri. Ini alasan yang memang masuk akal, akan tetapi jika ditelusuri lebih banyak kelirunya. Masalahnya, berapa sebenarnya BBM yang diselundupkan? Apakah besar? Justru yang patut dipertanyakan adalah mengapa begitu mudahnya terjadi penyelundupan ke negeri jiran? Tentu ada apa dengan polisi atau petugas perbatasan? Seharusnya untuk mengatasinya, harus memperkuat penegakan hukum, termasuk sanksi yang amat berat bagi semua yang terlibat, tanpa kecuali.

5. Pencabutan Subsidi BBM “Mengurangi Kemiskinan.”

Ini menjadi aneh, ketika diopiniikan bahwa pencabutan subsidi BBM bertujuan untuk mengurangi kemiskinan. Berarti selama ini di dalam pos APBN tidak ada pos pengentasan kemiskinan. Padahal sejatinya baik masalah kemiskinan, pendidikan dan kesehatan seharusnya menjadi kewajiban atau tanggungjawab Negara, wujudnya adalah dianggarkan dalam APBN. Malah mengambil dari pengurangan subsidi BBM.

6. Biaya Produksi BBM (Bensin Premium) dan Fakta Subsidi

a. Biaya Produksi

Sebenarnya sejak orde baru hingga orde sekarang belum ada secara pasti atau terbuka berapa biaya produksi BBM sesungguhnya. Inilah sesuatu yang selalu ditutupi rezim. Seharusnya biaya produksi bisa secara terbuka diketahui oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Makanya Ichsanuddin Noorsy (Bincang Perubahan, 2022) meminta untuk dilakukan audit investigatif terhadap biaya produksi BBM sebenarnya. Dulu pada masa SBY, berdasarkan analisis yang dilakukan oleh mantan Bappenas Kwik Kian Gie (Republika, 23 Februari 2005), sebenarnya harga pokok produksi BBM (Bensin Premium) adalah Rp540. Harga Pokok Produksi Bensin Premium terdiri dari tiga komponen, yaitu; (1) Biaya Penyedotan; (2) Biaya Penyulingan; (3) Biaya transportasi. Sehingga rumusnya menjadi: $X + Y + Z = \$10$ dollar perbarrel. Satu barrel sama dengan 159 liter. Kalau nilai tukar rupiah satu dollar AS sama dengan Rp8600, maka keseluruhan biaya untuk 1 liter adalah $(10 \times \text{Rp}8600):159 = \text{Rp}540,88$, dibulatkan menjadi Rp540.

Seperti diketahui waktu itu, bensin premium sebelum dinaikkan adalah Rp1.810 per liter. Jadi, untuk setiap penjualan satu liter bensin premium, pemerintah kelebihan uang Rp1.270, yaitu kemasukan uang dari menjual bensin sebanyak Rp1.810. Apalagi dengan naiknya harga bensin premium menjadi Rp2400. Kelebihan uang yang diperoleh oleh pemerintah sebesar Rp1.860. Kalau dikurs pada masa sekarang tahun 2022 Rp14.500 berarti 1 liter bensin menjadi $(\$10 \times \text{Rp}14.500):159 = \text{Rp}910$.

Adapun saat sekarang dengan harga Rp10.000 per liter pertalite, menurut Ichsanudin sebenarnya belum terjadi subsidi artinya itu sudah harga pasar yang berarti pemerintah sudah untung dengan asumsi harga minyak 80 dollar per barel. Makanya

Norsy meminta untuk dilakukan audit investigasi terhadap impor minyak mentah, impor minyak olahan, pembiayaan, distribusi sehingga apakah memang layak subsidi. Dengan begitu akan terang benderang harga minyak BBM sehingga memberikan informasi yang bisa diterima oleh masyarakat dan menghilangkan kecurigaan kepada pemerintah.

b. Subsidi

Ditinjau dari segi keluar masuknya uang, pemerintah sebenarnya kelebihan uang tunai. Mengapa pemerintah memberikan subsidi? Apakah tidak sebaliknya? Yaitu justru rakyat yang memberikan subsidi kepada pemerintah. Istilah subsidi yang diberikan kepada rakyat selama ini, Kwik Kian Gie pernah menyampaikan adalah istilah yang menipu, karena sebenarnya yang terjadi adalah opportunity loss (kerugian akibat harga hanya diperhitungkan biaya pengolahan dan distribusi saja, tanpa melihat harga internasional) bukan real out of pocket money loss (kerugian uang yang real dikeluarkan).

Dengan kurs yang sama pada saat ini tahun 2022, yaitu Rp14.500 per dollar AS, harga minyak mentah di luar negeri per barrel sebesar $\$80 \times \text{Rp}14.500 = \text{Rp}1.160.000$. Perliternya dibagi 159 atau sama dengan Rp7.295. Ini harga minyak mentah di luar negeri. Kalau dijadikan bensin, ditambah dengan tiga biaya tadi (penyedotan, penyulingan, dan transportasi) yaitu sebesar Rp910 per liter. Maka harga bensin di luar negeri $\text{Rp}7.295 + \text{Rp}910 = \text{Rp}8.205$ per liter.

Bayangkan! berapa kesempatan yang hilang. Ya, Kesempatan itulah yang hilang, bukan uang tunai. Jadi, sesungguhnya yang dinamakan subsidi itu pengertian abstrak yang sama sekali tidak berimplikasi adanya uang keluar. Dalam kenyataannya pemerintah mendapatkan kelebihan uang.

Jadi menurut Kwik kalau kita asumsikan produksi minyak untuk Indonesia 787.500 barel per hari atau 125.212.500 liter (setelah dikurangi hasil kontrak bagi hasil/PSC) Per tahunnya dikalikan 365 hari, menjadi 45.702.562.500 liter. Kalau kelebihan uangnya tadi adalah Rp1.270, maka kelebihan uang pertahunnya adalah Rp58.042.254.375.000 ($45.702.562.500 \times \text{Rp}1.270$). Ini kalau kita tidak mengimpor bensin premium. Akan tetapi kebutuhan premium dalam negeri sebanyak 60.000.000.000 liter per tahun, sehingga kita mengimpor sebanyak 14.297.437.500 liter, dan ini harus dibayar dengan harga dunia sebesar Rp3.200. Maka nilai rupiah impornya sebesar Rp46.323.697.500.000. Meskipun demikian, pemerintah tetap mendapatkan kelebihan uang tunai sebesar Rp11.718.556.875.000.

Berdasarkan uraian matematis di atas, ternyata subsidi bukan berarti uang keluar, akan tetapi kesempatan untuk mendapatkan kelebihan yang besar menjadi hilang. Karena itu, menurut Kwik seharusnya istilah subsidi diganti dengan istilah selisih antara harga internasional dengan harga yang ditetapkan/dipaksakan oleh pemerintah untuk diberlakukan kepada bangsanya sendiri.

7. Relevansi Harga Internasional dengan Harga Nasional

Patut kita pertanyakan apakah harga internasional yang ditentukan oleh mekanisme pasar merupakan harga sebenarnya? Sehingga harga nasional harus mengikuti harga internasional? Menurut teori pasar, ini sebenarnya bukan harga sebenarnya karena dua alasan, yaitu; Pertama, karena bentuk pasarnya di Indonesia adalah monopoli, dengan pemerintah sebagai pelaksana dari pemilik monopolinya, yaitu rakyat. Kedua, harga yang sebenarnya menurut pasar terjadi pada pasar yang sempurna (perfect competition).

Di Indonesia, untuk harga BBM yang terjadi bukan pada persaingan yang sempurna atau pasar yang sempurna akan tetapi pada pasar monopoli. Sehingga dengan demikian, harga yang terbentuk dalam pasar yang bentuknya persaingan sempurna di New York dengan volume perdagangan yang hanya 30% dari seluruh produksi minyak dunia, tidak relevan sama sekali buat rakyat Indonesia.

8. Pandangan Islam Terhadap BBM dan SDA

Hubungan pemerintah dengan rakyat dalam masalah BBM sebagai produk sector publik bukanlah hubungan antara penjual dan pembeli, melainkan hubungan antara yang mengurus urusan rakyat dan rakyatnya yang berhak menikmati harta kekayaan milik umum tersebut dengan gratis atau harga murah (Sutjipto, 2005).

BBM termasuk barang yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Islam menetapkan BBM dalam kelompok barang tambang milkiyyah 'ammah, yakni dimiliki oleh umum atau masyarakat lantaran jumlahnya yang tak terhitung. Menurut Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani dalam Nizham al-iqtishodi fi al-Islam halaman 213, eksplorasi maupun eksploitasi barang tambang yang tak terhitung ini harus dilakukan oleh Negara atas nama rakyat kaum Muslim sebagai pemiliknya untuk dikelola dalam rangka mensejahterakan kehidupan rakyat.

Dalam Islam, konsep kepemilikan umum seperti BBM telah dinyatakan dalam sabda Rasulullah saw:

«...لَاءِ وَالنَّارِ وَالنَّاسِ شَرْكَاءُ فِي ثَلَاثٍ ، الْمَاءِ وَالْأُكِّ»

Manusia berserikat (punya andil) dalam tiga hal, yaitu air, padang rumput, dan api, harga ketiganya (menjualnya, pent) adalah haram. (HR Ibn Majah).

Maksudnya, sumber-sumber kehidupan bagi suatu negeri seperti air bersih, laut,

energi, dan hutan bukanlah milik perorangan atau badan, akan tetapi setiap individu rakyat berhak untuk memanfaatkannya. Pemerintah hanya mendapat mandate untuk mengusahakan atau mengelalanya agar manfaati itu benar-benar sampai ke seluruh rakyat secara adil dan merata.

Pendapat bahwa sumber daya alam milik umum harus dikelola oleh negara untuk hasilnya diberikan kepada rakyat dikemukakan oleh An-Nabhani berdasarkan pada hadits riwayat Imam At-Tirmidzi dari Abyadh bin Hamal. Dalam hadits tersebut, Abyad diceritakan telah meminta kepada Rasul untuk dapat mengelola sebuah tambang garam. Rasul meluluskan permintaan itu, tapi segera diingatkan oleh seorang shahabat,

“Wahai Rasulullah, tahukah engkau, apa yang engkau berikan kepadanya? Sesungguhnya engkau telah memberikan sesuatu yang bagaikan air mengalir (ma’u al-‘iddu)” Rasulullah kemudian bersabda: “Tariklah tambang tersebut darinya”.

Ma’u al-‘iddu adalah air yang karena jumlahnya sangat banyak digambarkan mengalir terus menerus. Hadist tersebut menyerupakan tambang garam yang kandungannya sangat banyak dengan air yang mengalir. Bahwa semula Rasulullah SAW memberikan tambang garam kepada Abyadh menunjukkan kebolehan memberikan tambang garam atau tambang yang lain kepada seseorang. Tapi ketika kemudian Rasul mengetahui bahwa tambang tersebut merupakan tambang yang cukup besar, digambarkan bagaikan air yang terus mengalir, maka Rasul mencabut pemberian itu, karena dengan kandungannya yang sangat besar itu tambang tersebut dikategorikan milik umum. Dan semua milik umum tidak boleh dikuasai oleh individu.

Yang menjadi fokus dalam hadits tersebut tentu saja bukan “garam”, melainkan tambangnya. Terbukti, ketika

Rasul mengetahui bahwa tambang garam itu jumlahnya sangat banyak, ia menarik kembali pemberian itu. An-Nabhani mengutip ungkapan Abu Ubaid yang mengatakan:

“Adapun pemberian Nabi SAW kepada Abyadh bin Hambal terhadap tambang garam yang terdapat di daerah Ma’rab, kemudian beliau mengambilnya kembali dari tangan Abyadh, sesungguhnya beliau mencabutnya semata karena menurut beliau tambang tersebut merupakan tanah mati yang dihidupkan oleh Abyadh lalu dia mengelolanya. Ketika Nabi SAW mengetahui bahwa tambang tersebut (laksana) air yang mengalir, yang mana air tersebut merupakan benda yang tidak pernah habis, seperti mata air dan air bor, maka beliau mencabutnya kembali, karena sunnah Rasulullah SAW dalam masalah padang, api dan air menyatakan bahwa semua manusia berserikat dalam masalah tersebut, maka beliau melarang bagi seseorang untuk memilikinya, sementara yang lain tidak dapat memilikinya”.

Penarikan kembali pemberian Rasul kepada Abyadh adalah illat dari larangan sesuatu yang menjadi milik umum termasuk dalam hal ini barang tambang yang kandungannya sangat banyak untuk dimiliki individu. Dalam hadits dari Amru bin Qais lebih jelas lagi disebutkan bahwa yang dimaksud dengan garam di sini adalah tambang garam atau “ma’danul milhi” (tambang garam).

Adapun hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud, bahwa Rasulullah telah memberikan tambang kepada Bilal bin Harits Al Muzni dari kabilahnya, serta hadits yang diriwayatkan oleh Abu Ubaid dalam kitab Al Amwal dari Abi Ikrimah yang mengatakan: “Rasulullah saw.memberikan sebidang tanah ini kepada Bilal dari tempat ini hingga sekian, berikut kandungan buminya, baik berupa gunung atau tambang,” sebenarnya tidak bertentangan dengan hadits Abyadh ini.

Hadits di atas mengandung pengertian bahwa tambang yang diberikan oleh Rasulullah kepada Bilal kandungannya terbatas, sehingga boleh diberikan. Sebagaimana Rasulullah pertama kalinya memberikan tambang garam tersebut kepada Abyadh. Tapi kebolehan pemberian barang tambang ini tidak boleh diartikan secara mutlak, sebab jika diartikan demikian tentu bertentangan dengan pencabutan Rasul setelah diketahui bahwa tambang itu kandungannya besar bagaikan air yang terus mengalir. Jadi jelaslah bahwa kandungan tambang yang diberikan Rasulullah tersebut bersifat terbatas.

9. Solusi Taktis dan Strategis

Dengan memperhatikan penjelasan di atas, maka solusi yang ditawarkan untuk mengakhiri problematika umat yang berkepanjangan dalam kasus kenaikan harga BBM, adalah: solusi taktis dan strategis.

Solusi Taktis

- a. Lakukan audit investigative terhadap biaya produksi BBM, mulai dari pengolahan, pendistribusian baik minyak mentah maupun minyak olahan, sehingga menghilangkan kecurigaan dari masyarakat.
- b. Meninjau ulang UU MIGAS No. 22 tahun 2001 (saat ini sedang direvisi yang rampung November 2022) yang lebih berpihak kepada pengusaha asing (Pasal 22: perusahaan yang mengeksplorasi wajib menyerahkan PALING BANYAK 25% dari produksi minyak dan gas bumi.
- c. Memaksimalkan kemampuan Sumber daya manusia Indonesia khususnya untuk menguasai teknologi tingkat tinggi seperti teknologi eksplorasi dan eksploitasi.
- d. Melakukan penghematan pos-pos APBN dengan skala prioritas menjadi ukuran penggunaan APBN, seperti pendidikan, kesehatan dan industri teknologi tinggi.

- e. Meninggalkan ideologi kapitalisme yang merupakan faktor utama penyebab permasalahan naiknya BBM dan permasalahan lainnya.

Solusi Strategis

- a. Membangun karakter penguasa yang memiliki kepribadian Islam yang Tangguh yang pro pada kepentingan rakyat bukan kepada kepentingan oligarki kapitalisme.
- b. Membangun sebuah institusi yang mampu menerapkan Sistem Islam secara komprehensif seperti pada masa Rasulullah saw dan para khulafaurrasyidin.

KESIMPULAN

Sesungguhnya penyelesaian permasalahan BBM ini tidaklah begitu rumit dan sulit. Menjadi rumit dan sulit ketika kita tidak memahami akar permasalahan. Perlu diberikan suatu pemahaman kepada umat, bahwa ada dua jenis permasalahan yaitu permasalahan utama dan permasalahan sekunder. Permasalahan sekunder dapat terselesaikan dengan sendirinya apabila permasalahan utama. Suatu ibarat (perumpamaan) ketika seseorang menangkap seekor ular, maka apabila ia menangkap ekornya, tentu kepalanya akan mematok dirinya. Namun bila sang penangkap ular paham dan sudah ahli, tentu yang pertama dilakukan adalah menangkap kepala ular, sehingga ekor dengan mudah ditangkap.

Demikian pula dengan menghadapi permasalahan manusia (umat), perlu kita mengetahui permasalahan utama dari suatu kejadian, khususnya masalah BBM. Permasalahan BBM adalah masalah cabang dan hanyalah hasil dari tidak terselesaikannya masalah utama yaitu tidak diterapkannya hukum Allah swt khususnya di bidang ekonomi Islam di negeri ini. Negeri ini membutuhkan kepemimpinan yang amanah dan professional serta berkepribadian Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Adioetomo, S. M., & Samosir, O. B. (Eds.). (2010). *Dasar Dasar Demografi*. Jakarta: Salemba Empat.
- An Nabhani, Taqiyuddin (1990), An Nizhom Iqtishodi fi Al Islam, Beirut.
- An Nabhani, Taqiyuddin (1995), Sistem Khilafah: Konsep Kenegaraan dan Kepemimpinan Umat Islam Seluruh Dunia, Khazanah Islam.
- An Nabhani, Taqiyuddin,(1953),Syakshiyah Islamiyyah, Juz Awwal, Darrul Ummah.
- Revrison, (2005), Dialog BBM, SCTV, 2 Maret 2005
- Kwik Kian Gie (2005), Menaikan Harga Bensin Premium, Harian Republika, 23 Februari 2005.
- Eksekutif Wilayah (tt), EW-LMND Riau, dan JMD Riau, Kepentingan Siapa, Dibalik Rencana Kenaikan BBM?, Makalah.
- Noorsy, Ichsanudin (2022), Biaya Pokok Produksi BBM: Perlu Audit Invesigatif, Bincang Perubahan, <https://www.youtube.com/watch?v=HMY3k-VZENM>
- Koran Tempo, 18 Februari 2005.
- Saparini, Hendri,(2005), Pantas Saja BBM Dinaikkan, Harian Riau Pos, 02 Maret 2005.
- Sutjipto, Hady (2005), Menyoal Pengurangan Subsidi BBM, Media Politik dan Dakwah; Al-Wa'ie, edisi Januari, No.53.
- Tim Redaksi, Mempertanyakan Logika Seputar Pencabutan Subsidi BBM, Buletin Mingguan; Al-Islam, edisi 243 tahun 2005.
- <https://www.cnbcindonesia.com/news/20220904150728-4-369148/harga-bbm-pertamina-resmi-naik-banyak-untung-atau-rugi>
- <https://blog.amartha.com/kenapa-harga-bbm-naik-2022>